

ANALISIS PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM BERBASIS AKUNTANSI KOPERASI DAN PERENCANAAN PERMODALAN DI KOTA BOGOR

ANALYSIS EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MSMEs IN BOGOR CITY BASED ON COOPERATIVE ACCOUNTING AND CAPITAL PLANNING

IC Kusuma^{1a} dan AB Setiawan¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^aKorespondensi: Indra Cahya Kusuma, E-mail: indrachyasmantibo84@gmail.com
(Diterima: 03-01-2012; Ditelaah: 10-01-2012; Disetujui: 15-03-2012)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accounting ability, particularly in financial management, preparation of financial statements, and capital planning and management, of the cooperative and MSME's management/businessmen in Bogor City. Cooperatives and MSMEs in Bogor were the object of this study. A quantitatively descriptive approach was used. Sampling was done by using a purposive sampling and simple random sampling method. A total of 163 cooperatives and 379 SMEs were selected as samples. Data were analysed by using the multiple linear regression. Results showed that there was a simultaneous and partial effect of cooperative accounting and capital planning on the success of the empowerment of cooperatives in Bogor. As for the MSME entrepreneurs, it was found that many of them still did not understand how to create financial statements and to make good capital planning. Therefore, a sustainable empowerment from the government institutions through trainings, mentoring, and capital assistance was required.

Key words: cooperative accounting, capital planning and empowerment.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pengurus atau pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Bogor dalam bidang akuntansi, khususnya pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan permodalan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan objek penelitian adalah koperasi dan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Dengan jumlah sampel sebanyak 163 koperasi dan 379 UMKM. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Bogor. Sedangkan untuk pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum mengerti cara membuat laporan keuangan serta belum dapat merencanakan permodalan dengan baik dan diperlukan upaya pemberdayaan berkesinambungan dari instansi pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan permodalan.

Kata kunci: akuntansi koperasi, perencanaan permodalan dan pemberdayaan.

Kusuma IC dan AB Setiawan. 2012. Analisis pemberdayaan koperasi dan UMKM berbasis akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora* 3(1): 43 – 50.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bogor tahun 2011, UMKM dan koperasi mampu menyerap tenaga sebanyak 85,4 juta pekerja atau sekitar 96,8% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan nilai kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) telah mencapai Rp 1,778 triliun atau 53% dari total PDRB Indonesia. Berdasarkan data BPS Kota Bogor tahun 2011, potensi UKM antara lain dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang relatif banyak, kemampuan yang menunjang kegiatan kepariwisataan dan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Dari segi koperasi, jumlah yang terdata sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 774 koperasi dan jumlah UMKM yang masuk pembinaan Pemerintah Kota Bogor mencapai 32.901 UMKM. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM, sampai tahun 2011 telah mencapai 58.249 orang, sedangkan dari jumlah aset investasi capaian UMKM ditahun 2011 berkisar pada angka Rp 575,397 miliar lebih.

Ada beberapa kendala dan keterbatasan Koperasi dan UMKM di Kota Bogor yang sampai saat ini relatif sulit berkembang dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) terbatasnya akses, kapasitas dan kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengenali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya produktif; 2) rendahnya produktivitas mengakibatkan lemahnya daya saing Koperasi dan UMKM; 3) rendah kualitas kelembagaan atau formalisasi usaha; 4) rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara produktif, efektif dan efisien, serta lemahnya *entrepreneurship* dan kualitas

SDM; 5) kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebutuhan masyarakat barat terutama Eropa. Sebagai sebuah konsep, *empowerment* masih bersifat umum, sehingga apabila tidak hati-hati kajian terhadap konsep ini diibaratkan seperti menyentuh cabang atau daun tetapi tidak menyentuh akar permasalahan baik yang sifatnya mendasar maupun yang terjadi dalam suatu proses.

Ada dikotomi antara memberdayakan dengan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Sumodiningrat (1997). Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi (berdaya) untuk berkembang;
2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan penyediaan input (masukan), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang;
3. melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan, dengan mencegah yang lemah menjadi lemah.

Menciptakan suatu wilayah yang berdaya perlu adanya pemihakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan yang disertai penciptaan peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Konsep *empowerment* muncul karena adanya kegagalan dan harapan yaitu gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan dengan harapan adanya pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, persamaan antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman 1992).

Menurut Argyris (1998), pemberdayaan merupakan program yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan karena membutuhkan komitmen yang kuat. Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena adanya keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk diberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab. Argyris (1998) membagi komitmen menjadi dua yaitu komitmen eksternal dan komitmen internal.

Komitmen eksternal dibentuk oleh lingkungan kerja. Komitmen ini muncul karena adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para karyawan yang menghasilkan adanya *reward* dan *punishment*. Peran manajer sangat vital dalam menentukan timbulnya komitmen ini karena belum adanya kesadaran individual atas tugas yang diberikan. Sedangkan komitmen internal merupakan komitmen yang berasal dari diri seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas, tanggung jawab dan wewenang berdasarkan pada alasan dan motivasi yang dimilikinya. Munculnya komitmen internal sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan dan lingkungan organisasi dalam menumbuhkan sikap dan perilaku profesional dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan.

Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Undang-undang No. 25/1992 pasal 1 berbunyi bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi

merupakan organisasi ekonomi yang otonomi yang dimiliki oleh para anggotanya sebagai rekanan atau pelanggan dari perusahaan koperasi.

Karakteristik Koperasi

Hanel (1989) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari organisasi koperasi adalah sebagai berikut:

1. kesukarelaan untuk bekerja sama. Hal ini dapat berarti tidak ada keanggotaan yang bersifat keharusan secara tidak langsung atau secara bersyarat;
2. kesamaan hak dan kerjasama;
3. kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu.

Wirasmita (1992:5-6) menyatakan bahwa untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan berhasil sesuai dengan karakter dasarnya sekaligus dapat berkembang dalam situasi persaingan yang ketat. Kriteria pengembangan koperasi dapat diukur dengan besarnya volume usaha, modal dan kegiatan usaha, serta nilai aset, baik yang dimiliki koperasi maupun anggotanya.

Prinsip koperasi menurut Hendar dan Kusnadi (2005:2) adalah sebagai berikut:

1. keanggotaan yang bersifat terbuka (*open memberships and voluntary*),
2. pengawasan secara demokratis (*democratic control*),
3. bunga yang terbatas atas modal (*limited interest of capital*),
4. pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (*proportional distribution of surplus*),
5. penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*),
6. tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik (*political, racial, religious neutrality*),
7. barang-barang yang dijual harus merupakan barang asli, tidak rusak atau palsu (*adulterated goods forbidden to sell*), dan
8. pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan (*promotion of education*).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya yang dapat menimbulkan definisi usaha kecil dari beberapa segi.

Usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,00. Ciri-ciri usaha mikro dapat dilihat sebagai berikut:

1. jenis barang atau komoditi usaha tidak selalu tetap (sewaktu-waktu dapat berganti);
2. tempat usahanya tidak selalu menetap (sewaktu-waktu dapat pindah tempat);
3. belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 kriteria usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut.

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.
 5. Berdasarkan status kepemilikan yaitu pengusaha yang berbentuk perseorangan, bila berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Akuntansi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat

dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK 27).

Foy (1994) telah mengungkapkan empat kemampuan atau *skill* manajerial yang perlu dimiliki oleh pemimpin suatu organisasi, yaitu:

1. *conceptual skills* yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi;
2. *human skills* yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok;
3. *administratif skills* yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan;
4. *technical skills* yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur atau teknik-teknik dari bidang tertentu, misalnya akuntansi, pemasaran, dan lain-lain.

Arens dan Loebecke (2003:13) mengatakan *accounting is the recording, classifying, and summarizing of economic events in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making*. Dengan demikian, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Untuk mengetahui sejauh mana koperasi dan UMKM mampu mengembangkan usahanya, dapat dilihat dari kondisi kinerjanya yang dapat diukur dari berbagai macam pendekatan tergantung dari sisi mana suatu analisis digunakan Hanel (1998). Hanel (1998) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja koperasi dibagi dalam dua bagian, yaitu: (1) analisis finansial yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio profitabilitas, kegiatan usaha, permodalan, dan peranan usaha penunjang; (2) analisis non finansial yang dianalisis melalui partisipasi anggota, produktifitas karyawan dan manajer koperasi.

Permodalan

Pada awalnya, orientasi pengertian modal adalah *physical oriented* (Riyanto 1995:17).

Dalam pengertian ini, modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Menurut Riyanto (1995:17), modal dalam perkembangannya menjadi bersifat *non physical oriented* yakni pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai, atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) memberikan batasan mengenai pengertian modal kedalam dua jenis modal yaitu modal keuangan dan modal fisik. Menurut konsep modal keuangan seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan kata akatifa bersih atau ekuitas perusahaan. Sedangkan menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada misalnya unit *output* perhari.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Bogor, (2) penerapan akuntansi koperasi bagi Koperasi dan UMKM di Kota Bogor, dan (3) perencanaan permodalan bagi Koperasi dan UMKM di Kota Bogor.

MATERI DAN METODE

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan data yang dapat mewakili dilakukan penarikan sampel. Penarikan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* (kriteria tertentu) dan *simple random sampling* (Natsir 2003). Pengambilan sampel pertama didapat dari populasi umum Koperasi sebanyak 724 buah dan UMKM sebanyak 32.901 atau secara keseluruhan sebanyak 33.625 pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Bogor berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2011.

Kriteria jumlah Koperasi dan UMKM yang masuk sebagai binaan dan terdata di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sampai dengan tahun 2012 ada sebanyak 275 Koperasi aktif dan 11.997 UMKM. Dengan menggunakan

simple random sampling diperoleh sampel sasaran sebanyak 163 koperasi dan 379 UMKM.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 menunjukkan definisi operasional masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1. Operasional variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala ukur
Pengetahuan akuntansi koperasi (X1)	Pengetahuan tentang akuntansi koperasi adalah segala informasi yang diketahui baik yang diperoleh dari hasil belajar maupun dari pengalaman secara langsung maupun tidak langsung meliputi: prinsip, metode, dan prosedur tentang akuntansi koperasi, dalam hal ini adalah standar akuntansi perkoperasian (PSAK No. 27).	1. Dapat menyusun laporan keuangan	Ordinal
		2. Pencatatan transaksi di buku harian	Ordinal
		3. Pencatatan transaksi di buku jurnal	Ordinal
		4. Pencatatan transaksi di buku besar	Ordinal
		5. Penyajian laporan keuangan	Ordinal
Perencanaan permodalan (X2)	Melakukan perencanaan penggunaan modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (UU tentang Koperasi No. 25/1992).	1. Perencanaan penggunaan dana	Ordinal
		2. Modal sendiri	Ordinal
		3. Dana cadangan usaha	Ordinal
		4. Bantuan dari lembaga pemerintah	Ordinal
		5. Kemudahan memperoleh pinjaman	Ordinal
		6. Modal pinjaman	Ordinal
Keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Y)	Keberhasilan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan dan menggambarkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.	1. Adanya perencanaan	Ordinal
		2. Peningkatan laba	Ordinal
		3. Peningkatan dana	Ordinal
		4. Peningkatan usaha	Ordinal
		5. Peningkatan aset	Ordinal
		6. Pelatihan dan pendidikan	Ordinal
		7. Kerjasama	Ordinal
		8. Kontribusi pembangunan	Ordinal
		9. Kesejahteraan anggota atau karyawan	Ordinal

Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian (kondisi Koperasi dan UMKM dilihat dari akuntansi koperasi apakah sudah dijalankan,

terutama penyusunan laporan keuangan serta aspek perencanaan permodalan). Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik regresi linier berganda (*multiple regresion linier*), dengan maksud untuk melihat keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM berbasis akuntansi koperasi dan perencanaan modal (Sugiono

2007). Rumusan uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + v$$

Keterangan: 0 = konstanta; $1, 2$ = koefisien regresi; X_1 = akuntansi koperasi; X_2 = perencanaan permodalan; Y = keberhasilan pemberdayaan koperasi; v = eror atau variabel pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Regresi secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian pada tabel 2 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,069 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($= 5\%$), sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 3,09. Dengan membandingkan nilai F_{hit} (56,990) $> F_{tab}$ (3,09), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal itu berarti dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

Tabel 2. Pengujian koefisien regresi secara simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2102,678	2	1051,339	42,069	,000 ^b
1 Residual	2923,914	117	24,991		
Total	5026,592	119			

Tabel 3. Pengujian koefisien regresi secara parsial

Coefficients(a)					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27,684	3,789		7,306	,000
1 Akuntansi koperasi	,244	,076	,230	3,199	,002
Perencanaan modal	,890	,113	,563	7,851	,000

a. dependent variable: keberhasilan pemberdayaan; b. predictors: (constant), perencanaan modal, akuntansi koperasi.

Pengujian Model Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pengaruh Faktor Akuntansi Koperasi (X_1) terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor akuntansi koperasi sebesar 3,199 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($= 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit} (3,199) $> t_{tab}$ (1,980) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor akuntansi koperasi terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

Pengaruh Faktor Perencanaan Permodalan (X_2) terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor perencanaan permodalan sebesar 7,851 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($= 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit} (7,851) $> t_{tab}$ (1,980) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

Akuntansi Koperasi Bagi UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha UMKM di Kota Bogor tidak tahu dan tidak mengerti cara membuat dan menyusun laporan keuangan, serta bagaimana cara mencatatnya. Faktor kendala ketidaktahuan pelaku usaha UMKM antara lain adalah tingkat pendidikan rata-rata yang rendah, ketidaktahuan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Koperasi dan UMKM, dan berusaha dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup, sehingga banyak pelaku usaha jarang melakukan difersifikasi dan inovasi usaha, sehingga diperlukan adanya suatu pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang baik.

Perencanaan Permodalan Bagi UMKM

Sebagian besar pelaku usaha UMKM Kota Bogor dalam melakukan usaha tidak pernah merencanakan berapa kebutuhan modal yang akan digunakan dan berapa kecukupan modal untuk kedepannya. Sehingga pada saat pelaku usaha UMKM membutuhkan dana untuk memperluas usaha dengan meminjam lembaga perbankan terkendala dengan data-data laporan usaha yang diminta oleh pemberi dana. Disamping itu, jaranganya pelatihan maupun pendampingan yang diberikan oleh intitusi pemerintah yang terkait dengan permasalahan UMKM, mengakibatkan usaha mikro sulit untuk berkembang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi di Kota Bogor. Sedangkan untuk pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum mengerti cara membuat laporan keuangan serta belum dapat merencanakan permodalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arens AA and Loebecke. 2003. Auditing. Precentin Hall, New York.

- Argyris Chris. 1998. Emporwerment: The emperor new clother. *Harvard Business Review*, May-Jun, p.100.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2011. Kota Bogor dalam angka 2009-2011. BPS, Bogor.
- Foy Nancy. 1994. Empowering people at work. Grower Publishing Company, London.
- Friedman John. 1992. Empowerment, the politics of alternative development. Oxford University Press, USA.
- Hanel Alfred. 1989. Pokok-pokok pikiran mengenai organisasi koperasi dan kebijakan pengembangan di negara-negara berkembang. Edisi pertama. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. Ekonomi koperasi. Edisi kedua. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar akuntansi keuangan. Salemba empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No.129/Kep/M.KUKM/XI/2002/Tanggal 19 November 2002, Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.
- Natsir M. 2003. Metode penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyanto Bambang. 1995. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Metode penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.
- Wirasmita Yuyun. 1992. Strategi pembangunan sektor koperasi yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi. Dalam Rusidi dan Maman Suratman (Eds), Pokok-pokok pikiran tentang pembangunan koperasi. UPT Penelitian Bandung, Bandung.